

**PERJUANGAN LA PAWAWOI KARAENG SIGERI MENENTANG  
EKSPEDISI BELANDA TAHUN 1905**



PERPUSTAKAAN PRAT DWV. HASANUDDIN	
Tgl. diterima	25-10-94
Judul	-
Fungsi	1 (satu)
Tempo	H
No. Inventaris	952205296
Tempo	

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi  
salah satu syarat menyelesaikan  
Studi di Jurusan Sejarah dan Arkeologi  
pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

**OLEH**

**AGUSTINAH**

**STB : 89 07 407**

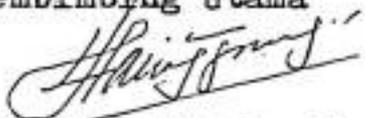
**1994**

Universitas Hasanuddin  
Fakultas Sastra  
Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor 608 /PTO4. H5.FS/C/1994 tanggal 5 April 1994 dengan ini menyatakan, menerima dan menyetujui skripsi ini.

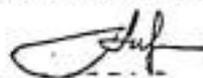
Ujung Pandang, 1994

Pembimbing Utama



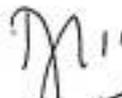
DR. Edward L. Poelinggomang

Pembantu Pembimbing



Drs. Bambang S., M.Hum.

Disetujui untuk diteruskan kepada  
panitia ujian skripsi  
Dekan, ub ketua jurusan Sejarah dan  
Arkeologi Fakultas Sastra Universitas  
Hasanuddin



Drs. Daud Limbugau, SU

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, *Sabtu* tanggal *27 Agustus* 1994  
panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang  
berjudul:

"PERJUANGAN LA PAWAOI KARAENG SIGERI MENENTANG  
EKSPEDISI BELANDA TAHUN 1905"

Dalam rangka memenuhi salah satu tugas persyaratan ujian  
akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Sejarah  
dan Arkeologi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, 1994

Panitia Ujian Skripsi

1. Prof. Dra. Ny. Marrang P., M.S.

Ketua

2. Drs. Baharuddin Batalipu

Sekretaris

3. Drs. Daud Limbugau, S.U.

Penguji I

4. Drs. Anwar Thosibo, M.Hum.

Penguji II

5. DR. Edward L. Poelinggomang, M.A.

Pembimbing I

6. Drs. Bambang S., M.S.

Pembimbing II

KATA PENGANTAR  
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Puji syukur penuli panjatkan kehadirat Allah SWT. atas anugrah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan merupakan hasil akhir dari study pada jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat bagi Nabi besar Muhammad SWT. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai Uswatun Hasanah bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pembaca demi kelengkapan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak DR. Edward L. Poelinggomang (selaku pembimbing utama) dan kepada bapak Drs. Bambang S. M. Hum (selaku pembimbing pembantu). Keduanya telah banyak membantu penulis, mengarahkan dan memberikan bahan-bahan literatur untuk melengkapi pengetahuan kami di dalam menulis serta menyusun skripsi ini.

Penulis mengucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Pimpinan Perpustakaan Kanwil. Dep. P dan K, Prop. Sulawesi Selatan, yang telah memberikan fasilitas kepada

kami untuk membaca serta meminjamkan buku-buku literatur, dan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai topik ini.

Penulis mengucapkan pula terima kasih kepada pimpinan Fakultas Sastra, ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi serta para dosen yang telah membekali pengetahuan, mendidik dan membina penulis selama dalam perkuliahan hingga selesai.

Penulis mengucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat dan semua pihak yang tak sempat kami sebutkan namanya satu persatu dalam tulisan ini.

Pada akhirnya sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada seluruh keluarga tercinta khususnya kepada Ayahanda dan Ibunda. Saudara-saudara saya yang tersayang, karena doa dan pengorbanannya serta dorongan dari mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kepada semua pihak tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal disisi Allah SWT, atas amal kebajikannya.

Akhir kata semoga hasil karya tulis ini dapat bermanfaat kepada para pembaca dan sekaligus dapat menambah perbendaharaan khasanah kesejarahan lokal pada daerah Sulawesi Selatan.

Penulis,

AGUSTINAH

## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Alasan Memilih Judul .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Metode Penelitian .....	8
BAB II. SEJARAH SINGKAT KERAJAAN BONE .....	10
A. Letak Geografis Kerajaan Bone .....	10
B. Sistem Politik Dan Pemerintahan .....	14
C. Sistem Sosial .....	24
BAB III. LA PAWAWOI KARAENG SIGERI MENDUDUKI TAKHTA KERAJAAN BONE .....	29
A. Pemilihan Raja Bone XXXI .....	29
B. La Pawawoi Karaeng Sigeri Sebagai Raja Bone ke 31 .....	31
BAB IV. PERANG BONE 1905 .....	40
A. Penyebab Munculnya Konflik .....	40
B. Penyerangan Belanda Terhadap Kerajaan Bone .....	42
C. Perjuangan Mempertahankan Kerajaan Bone .....	44
D. Berakhirnya Kekuasaan La Pawawoi Karaeng Sigeri .....	52
BAB V. KESIMPULAN .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN -LAMPIRAN .....	

BAB I  
P E N D A H U L U A N



A. Alesen Memilih Judul

Masa lampau adalah suatu pengetahuan yang sangat berarti bagi bangsa yang sedang membangun, seperti Indonesia sekarang ini. Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini merupakan realisasi dari kesinambungan kehidupan masa lampau. Sehingga dengan demikian nilai positif masa lampau perlu diambil dan dipegang terus sedangkan nilai negatifnya perlu ditinggalkan. Maka pengetahuan akan sejarah sangat berguna untuk perencanaan masa depan bangsa maupun daerah tingkat dua sebagaimana daerah tingkat dua Bone, sekarang ini.

Penulis beranggapan bahwa perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri akan terdapat hal yang bersifat positif, namun dibalik itu kemungkinan juga ada yang negatif. Namun, kebaikan dan keburukan perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri bukan tugas seorang sejarawan yang menilai. Akan tetapi sejarawan ataupun mahasiswa sejarah hanyalah berfungsi sebagai pengkisah melalui berbagai analise. Begitu pula dengan karya tulisan ini, hanya memaparkan apa adanya tentang kejadian pada tahun 1905 di daerah Bone. Hal tersebut bertujuan untuk menginfentarissikan data sejarah kabupaten Bone sebagai pelengkap karya-karya sejarah yang telah ada.

Dari berbagai karya sejarah tentang daerah Bone yang telah ada. Penulis melalui penelitian karya ini membaca skripsi Hasniati yang berjudul: "Bone: Dari Perang hingga Zelfbestuur (abad XIX-XX)." <sup>1)</sup> Karya itu, membahas lintasan perang Bone dari tahun 1824 sampai tercapainya pemerintahan sendiri (Zelfbestuur landschap) oleh Belanda. Hal itu berarti akan berbeda dengan penulisan skripsi ini. Tulisan ini hanya ditujukan pada ekspedisi Belanda pada tahun 1905 beserta perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri dalam mempertahankan kerajaan Bone.

Disamping skripsi tersebut, penulis juga temukan sebuah buku yang telah diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku itu berjudul "La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone XXXI" yang dikarang oleh Ny. Aminah Hamzah dan kawan-kawan. <sup>2)</sup> Karya itu akan jelas pula perbedaannya dengan skripsi ini, dimana karya Ny. Aminah Hamzah dkk. lebih menekankan kepada kehidupan pribadi La Pawawoi Karaeng Sigeri atau dalam penulisan yang siratnya "Biografi Pahlawan". Kepahlawanan itu-pun masih dalam artian subyektif, karena penulisannya lebih

<sup>1)</sup> Hasniati, Bone: Dari Perang Hingga Zelfbestuur (Abad XIX-XX), (Ujungpandang: skripsi S1 pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1992), 68 halaman.

<sup>2)</sup> Ny. Aminah Hamzah dkk., Biografi Pahlawan La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone XXXI, (Ujungpandang: Dep. Dik. Bud., 1993), 99 halaman.

bersifat lokal sentris, sedangkan skripsi ini memilih perspektif politik dan menekankan kenetralan sejarah atau kejadian.

La Pawawoi Karaeng Sigeri yang menggantikan raja Bone XXX Fatimah Banri telah mengundang masalah tersendiri pula. Ketika itu, yang menjadi putri mahkota-karena tidak ada putra mahkota- adalah Besse Bau. Hal itu berarti Besse Bau yang harus menjadi raja Bone menggantikan ibundanya Fatimah Banri dari hasil perkawinannya dengan Karaeng Popo, yang pada waktu itu Karaeng Popo dilarang tinggal di kerajaan Bone oleh Belanda. Dengan tidak bisanya Karaeng Popo tinggal di Bone berarti kerajaan Bone tidak bisa lagi bersatu dengan kerajaan Makassar. Akhirnya La Pawawoi Karaeng Sigeri dilantik menjadi raja Bone XXXI pada tahun 1895, menggantikan saudaranya,<sup>3</sup> atas dukungan Belanda.

Kejadian itu berlangsung pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Dimana akhir abad XIX pengalihan kekuasaan politik dari penaklukan kerajaan-kerajaan berubah menjadi : suatu kebijaksanaan politik etis.<sup>4</sup> Menurut M.C Ricklefs menyatakan bahwa alasan munculnya kebijaksanaan ini meng-

<sup>3</sup> Lahadjji Patang, Suiawesi dan Pahlawan-pahlawannya, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia, 1967), hal 22.

<sup>4</sup> Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme II, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal 22-23.

akibatkan perubahan-perubahan yang mendasar sedemikian rupa dalam lingkungan penjajahan. Dilanjutkan pula bahwa orang tidak akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad XX apabila tidak mengacu pada kebijaksanaan tersebut.<sup>5</sup> Kenyataannya, eksploitasi dan penaklukan terhadap kerajaan tetap berjalan seperti kerajaan Bone. Ekspedisi Belanda kepada kerajaan Bone berakhir dengan perang frontal dan perang gerilya raja Bone ke-31 pada bulan Juli sampai Nopember 1905.<sup>6</sup>

Perang Bone 1905 berawal dari aksi-aksi penaklukan yang dilakukan di daerah luar Jawa untuk memperluas wilayah kekuasaan Belanda. Daerah-daerah tersebut menjadi sasaran yang penting bagi Belanda dalam pembangunan ekonomi baru. Kejadian-kejadian ini berlaku pada masa-masa polemik atau perbincangan tentang pelaksanaan ide moral atau utang kehormatan terhadap rakyat Hindia Belanda. Pada masa inilah Gubernur Jenderal J.B. Van Heuts menggantikan Gubernur Jenderal W. Rooseboom pada tahun 1904 (1 Oktober 1904), melaksanakan suatu kebijaksanaan baru ke arah pengamanan daerah jajahan yang lebih

---

<sup>5</sup>M.G. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gama University Press, 1991), hal 227.

<sup>6</sup>Andi Muñ. Ali, Kumpa'na Bone. Perang Bone 1905, (Watampone: Percetakan Damai, 1984), hal 11-42. baca juga: Lontarak Akkarungeng, (Watampone: Pemda Bone, 1980), hal 169.

intensif, dengan tujuan pokok ialah menguasai secara langsung seluruh wilayah jajahan.<sup>7</sup> Untuk itu, dibentuk pasukan pendudukan untuk ekspedisi penaklukan kerajaan-kerajaan nusantara termasuk kerajaan Bone.

Usaha Belanda memperluas dan memperkokoh kekuasaannya di Sulawesi selatan pada awal abad ke 20, mendapat perlawanan dari raja-raja dan rakyat Sulawesi selatan. Khususnya kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri sangat gigih melawan kolonialisme Belanda. Padahal raja Bone ke 31 itu pernah mendapat bintang kehormatan dari Belanda pada tanggal 31 Agustus 1896,<sup>9</sup> atas jasa-jasanya terhadap Belanda. Akan tetapi karena Belanda menuntut kembali diserahkan sepenuhnya kerajaan Bone, maka La Pawawoi Karaeng Sigeri berjuang melawan Belanda.

Sebagai akibat dari penentangan itu, maka pada awal Juli 1905 kompeni Belanda mengirim ekspedisi militer dari Batavia dengan suatu armada perang. Ekspedisi tersebut terdiri atas 17 buah kapal perang dan kapal pengangkut pasukan dengan persenjataan lengkap, dipimpin oleh panglima operasinya kolonel infantrie Van Der Wedden. Pada tanggal 1 sampai 15 Juli 1905<sup>9</sup> usaha pemberangkatan ekspedisi

---

<sup>7</sup>Harun Kadir dkk, Op.cit., hal 66.

<sup>8</sup>Muh. Abduh dkk., Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi selatan, (Jakarta: Dep. Dik. Bud., 1985), hal 91.

<sup>9</sup>Harun Kadir dkk., Op. cit., hal. 68.

pasukan militer dari Jawa ke Bajoe sebuah pelabuhan besar kerajaan Bone. Begitu pula pihak kerajaan Bone, setelah mengetahui kedatangan pasukan ekspedisi Belanda, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Kerajaan Bone dinyatakan sebagai keadaan darurat perang oleh para pemimpinnya. Dari panglima perang sampai pada para dulung bersama iasy-karnya mendukung kebijaksanaan raja, dalam hubungannya dengan kedatangan imperialisme dan kolonialisme Belanda yang mau menguasai sepenuhnya kerajaan Bone.

#### B. Batasan Masalah

Penulis dalam meneliti dan menulis karya ini perlu kiranya membuat batasan masalah. Batasan masalah tersebut sebagai aturan dalam mengikuti penulisan sejarah secara ilmiah, juga bermaksud menggunakan permasalahan sesuai dengan topik yang dibahas. Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam sub bab alasan memilih judul, maka penulis membatasi persoalan pokok sebagai berikut:

1. Mengapa La Pawawoi Karaeng Sigeri menduduki takhta kerajaan Bone sebagai raja Bone ke-31 ?
2. Mengapa La Pawawoi Karaeng Sigeri berbalik menentang Belanda ?
3. Mengapa Belanda menyerang kerajaan Bone pada tahun 1905 ?

Penulis pun membentuk batasan tempat (spasial) dan batasan waktu (temporal) untuk melihat lebih jelas dari pembahasan ketiga persoalan itu. Pembatasan ini penting

artinya untuk dapat mengetahui latar belakang geografi, kebudayaan maupun keadaan kemasyarakatannya. Dimana latar belakang inilah yang akan menghubungkan proses perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri dalam melawan Belanda.

Batasan tempat karya ini hanya mengacu pada wilayah kerajaan Bone. Tempat ini tidak terbatas pada posisi dan letak kerajaan Bone saja, akan tetapi karya ini akan mengikuti peta perkembangan perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri baik strategi perangnya maupun keadaan perang gerilya yang dilakukannya. Secara keseluruhan karya ini akan menyoroti kerajaan Bone, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menyebut daerah-daerah kerajaan lain yang kebetulan saja dilewati atau dijadikan basis pertahanan perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri.

Sedangkan batasan waktu kejadian atau peristiwa karya ini secara umum akan menyoroti akhir abad ke 19 dan awal abad ka 20. Hal ini akan memperjelas perkembangan kebijaksanaan politik dan keadaan Hindia Belanda, termasuk kerajaan Bone. Tetapi khususnya pada tahun 1905 dari bulan Juli sampai Nopember karena pada waktu itu terjadi serangan secara frontal dan perang gerilya. Kedua strategi inilah yang akan membuat menarik karya ini.

### C. Metode Penelitian

Dalam mengerjakan karya ini, penulis menggunakan metode sejarah, yang dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik kajian. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan sumber<sup>10</sup> primer dan sumber sekunder. Dalam mengumpulkan sumber primer, berupa dokumen tentang perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri, penulis melakukan penelitian diberbagai tempat, seperti Museum La Pawawoi Kab. Bone, Kanwil Depdikbud Sulsel, Arsip Nasional RI Perwakilan Sulawesi selatan dan berbagai perpustakaan di Ujung.

Dalam penelusuran berbagai sumber tersebut, penulis menemukan antar lain lontarak akkarungeng, laporan Kolonial Belanda, laporan pemerintahan kerajaan Bone, laporan-laporan penelitian, juga buku-buku yang telah diterbitkan baik milik pribadi maupun koleksi perpustakaan.

---

<sup>10</sup>Keterangan yang rinci tentang sumber dalam penelitian dan penulisan sejarah terdapat dalam berbagai literatur, seperti: Mhd. Yusuf Ibrahim, Pengertian Sejarah: Beberapa Pembahasan Mengenai Teori dan Kaedah (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1986), hal. 64-90; Sidi Bazalba, Pengantar Sejarah Berbagai Ilmu (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1981), hal. 105-132; Edward L. Polinggomang, "Sumber dan Kritik Sejarah" (Ujungpandang: Makalah yang disampaikan pada Pelatihan Metodologi Sejarah Sekota Madya Ujungpandang diselenggarakan oleh KSS FS-UH, tanggal 20 Juni 1992)

Setelah berbagai sumber terkumpul, maka tahap berikutnya penulis melakukan kritik sumber<sup>11</sup>. Dalam tahapan ini, penulis hanya melakukan kritik interen yang bertujuan untuk menilai tingkat validitas keterangan dengan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap selanjutnya atau tahap ketiga dilakukan sintesa dari berbagai fakta untuk memiliki kaitan dengan sasaran kajian. Tahap terakhir adakah penyusunan kisah yang menghubungkan antar fakta yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>11</sup>Tentang kritik sumber, lihat: Muhd. Yusuf Ibrahim, Op. cit., hal. 91-119. Baca juga: Edwara. L. P., Op. cit., hal. 4-6. Juga disinggung oleh Sartono Kartodirjo, "Metode penggunaan Bahan Dokumen" dalam: Koentjaraningrat (ed), "Metode-metode penelitian Masyarakat" (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 44-69.

## BAB II

## SEJARAH SINGKAT KERAJAAN BONE

A. Letak Geografi Kerajaan Bone

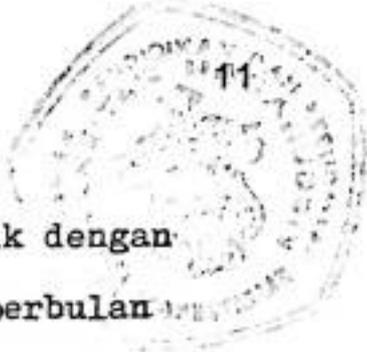
Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 23 kabupaten di jazirah selatan Sulawesi yang kita kenal sekarang memiliki perjalanan sejarahnya sendiri seperti halnya kabupaten lain di Sulawesi selatan. Wilayahnya terletak dalam posisi  $04^{\circ}30^1$  lintang selatan sampai dengan  $04^{\circ}35^1$  lintang selatan dan  $120^{\circ}17^1$  bujur timur sampai  $120^{\circ}24^1$  bujur timur.

Luas wilayah daerah Kabupaten Bone sebesar  $4607 \text{ km}^2$  yang terbagi atas 21 kecamatan dan 205 desa. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bone berbatasan utara dengan Kabupaten Wajo, sebelah timur dengan teluk Bone, sebelah barat dengan Kabupaten Soppeng dan sebelah selatan dengan Kabupaten Sinjai.<sup>1</sup>

Wilayah kabupaten ini mempunyai bentuk yang bervariasi mulai dari yang datar, berbukit sampai yang bergunung-gunung. Daerah pemukiman adalah areal yang relatif datar dengan ketinggian 0 sampai 25 meter dari permukaan laut.

---

<sup>1</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 432-433. baca juga: Abu Hamid, "Catatan-catatan tentang beberapa aspek kebudayaan Sulawesi selatan," Bingkisan Budaya Sulawesi selatan, (1978 Januari-Februari-Maret th I-4), hal. 4.



Iklm daerah ini termasuk iklim tropik dengan tipe iklim B dan C.<sup>2</sup> Curah hujan rata-rata perbulan 170 mm. Hujan yang turun di daerah ini terjadi atau berlangsung pada bulan Oktober sampai Juli. Musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus sampai September, suhu udara rata-rata berkisar  $23,5^{\circ}\text{c} - 31^{\circ}\text{c}$ , dengan suhu tertinggi  $32^{\circ}\text{c}$  dan terendah  $20^{\circ}\text{c}$ , kelembaban daerah ini memiliki rata-rata 75%.<sup>3</sup> Faktor iklim yang paling penting mempengaruhi ketahanan tanah terhadap erosi di wilayah tropika hingga mempunyai segala proses erosi mulai dari pencemaran partikel sampai dengan pengangkutannya. Daerah Bone banyak dipengaruhi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Curah hujan rata-rata pertahun 1000-2000 m, serta angin yang bertiup dari barat dan dari timur dengan kecepatan 2 meter sampai 10 meter/detik. Sedangkan pengaruh kelembaban udara berkisar 60-80 % (kelembaban nisbi ).

Dengan demikian maka faktor iklim sangat penting sekali karena mendukung proses kesuburan tanah sehingga dapat mempengaruhi produksi perkebunan rakyat Bone. Pada umumnya topografi tanah wilayah-wilayah kecamatan

---

<sup>2</sup>Shadily, Hassan (Pimpred). Ensiklopedi Indonesia, jilid 3. (Jakarta: Iktiar Baru-Van Hoeve, 1980. hal. 1376. Tipe iklim A, ialah iklim tropis penghujan, iklim B, ialah iklim kering, iklim C, ialah iklim sedang penghujan hangat.

<sup>3</sup>Ensiklopedi Nasional Indonesia, op. cit., hal. 432-433

terdiri dari 28 % tanah datar, 25 % berbukit-bukit, 33 % bergunung-gunung 14 % rawa-rawa, kecuali kecamatan Barebbo dan Tanete Riattang yang terletak dipinggiran laut. Teluk Bone sebagian besar terdiri atas tanah yang melebar menyusur pantai mulai dari kecamatan Mare, Tonra, Salomekko, ke selatan dan kecamatan Sinjai. Daerah-daerah inilah terdapat areal persawahan yang berbatasan dengan Kabupaten Wajo. Wilayah kecamatan yang terletak di pegunungan dan jauh dari kota Watampone adalah kecamatan Bonto Cani, Lappa Riaja, Libureng, Kahu dan kecamatan Ponre.

Dengan jenis tanah yang bervariasi, maka dapat mempengaruhi aktivitas manusia atau mata pencaharian. Hal itu dapat dibuktikan bahwa daerah yang dengan persawahan akan terdapat penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan apabila daerah yang kurang subur atau daerah berbatuan maka penduduknya akan berpenghasilan sebagai pedagang atau pekerja kasar. Jadi dengan kondisi alam yang bervariasi akan menyebabkan pula aktivitas atau pekerjaan penduduk bervariasi pula.

Keadaan tanah yang subur banyak terdapat di daerah-daerah pegunungan. Gunung-gunung yang terhitung cukup tinggi, tidak terdapat di wilayah Bone. Gunung yang dianggap tinggi disini, sebagian besar terdapat di selatan dan tenggara Kerajaan Bone, diantaranya: Ponce 2539

kaki, Pationgi dan Kalamisu masing-masing 2222 kaki, Terapong 2063 kaki, Salakang 1428 kaki, Tanete dan Latempu masing-masing 1269 kaki, Wawoda dan Garaccih masing-masing 1111 kaki, Lawi dan Ati-matiro masing-masing 952 kaki, Gona 794 kaki, dan Bottoe 318 kaki. Di sebelah dan utara dan barat daya membujur dataran tinggi, Buwa 1587 kaki, Tamping 1428 kaki, Kahu 1111 kaki, Kallieng, Batu lappa, Tjakarena, Mampu, Sinri, dan Lapitu masing-masing 952 kaki dan Silenrong 476 kaki.<sup>4</sup> Kesemuanya itu ditumbuhi hutan-hutan yang cukup lebat, di Bone tidak terdapat gunung berapi.

Sungai yang mengalir di daerah ini (sungai terbesar) adalah sungai Walanae dan Cenrana. Sungai Walanae berhulu di Gunung Bawakaraeng. Sungai ini mengalir bagian tenggara Bone, seluruh dataran Bengo, dan daerah Soppeng; beberapa anak sungainya mengalir daerah Lamuru berlanjut ke daerah-daerah Mario-ri-wawo dan Mario-ri-awa dan akhirnya bersatu dengan sungai Cenrana di sebelah timur danau Tempe di Sengkang. Jalur utamanya adalah dari selatan ke utara sungai Cenrana berhulu di gunung Latimijong, dibatas Luwu dan Toraja. Tidak jauh

---

<sup>4</sup>Razak Karim, Kerajaan Bone Sebelum Perang 1859, (Tampa penerbit/tahun terbit, Koleksi yayasan Kebudayaan Sul-sel), hal. 1 dan 2.  
Dan 1 kaki = 0,3048 meter

dari Sidenreng, sungai Cenrana ini bermuara di danau Tempe; setelah melalui Sidenreng dan dengan demikian menarik garis batas antara Wajo dan Bone, sungai Cenrana ini memasuki teluk Bone melalui lima muaranya. Jalur utamanya adalah dari utara ke selatan, dan setelah melalui danau Tempe, jalur tadi beralih menjadi barat ke Tenggara.<sup>5</sup>

#### B. Sistem Politik dan Pemerintahan

Dalam struktur pemerintahan tradisional diuraikan secara ringkas tentang gagasan gaukeng dan gagasan to manurung. Kedua gagasan itu sesungguhnya merupakan gagasan yang mendasari pembentukan pemerintahan dan khususnya pola sistem pemerintahan dan sistem politik di kerajaan Bone.

Gaukeng dipandang oleh masyarakat sebagai benda titisan, suci dan memiliki kekuatan gaib. Benda itu memiliki ciri yang khas dan berbentuk aneh berupa sepotong kayu, gambar, sepotong besi, umbian kering dan yang paling umum adalah berupa sebuah batu. Anggapan yang terpaut pada keunikan benda itu menyebabkan ia dipuja dan disembah sebagai pelindung jiwa masyarakat secara khusus. Penemu gaukeng kemudian ditempatkan sebagai

---

<sup>5</sup>Ibid.

pemimpin keagamaan maupun sebagai pemimpin keduniawian.<sup>6</sup> Ini merupakan awal dari adanya pemimpin dari kelompok anang (kaum).

Hubungan antara gaukeng, arajang (=Bahasa bugis) dan pemegang kekuasaan (pemimpin wanua atau raja) nampak tidak dapat dipisahkan. Benda-benda itu digunakan sebagai bukti pengabsahan kedudukan kepemimpinan. Beralihnya benda-benda itu ketangan orang lain berarti pula beralihnya kekuasaan kepada pemegang yang baru. Kedatangan To Manurung di Bone telah membawa pula arajang dan ditempatkan di istana. Waktu kedatangannya memakai kain kuning, kipas, puan (tempat siri) dan sehelai bendera yang mempunyai tujuh bintang bernama Waromporeng, adalah bendera persatuan Bone. ini membuktikan bahwa To Manurung mengerti akan makna bendera terhadap semangat dan kesatuan jiwa serta kecintaan rakyat pada suatu kerajaan, apalagi sebagai suatu kerajaan baru yang memerlukan kekuatan dalam mengisi pembangunan dalam kerajaannya.

Selanjutnya gagasan gaukeng yang terikat itu lambat laun berkembang menjadi satu kesatuan politik yang terkenal dengan sebutan wanua. Pemerintah wanua berada

---

<sup>6</sup>Harun Kadir, dkk. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950, Kerja sama Lembaga Penelitian UNHAS dengan BAPPEDA TK.I Sul-sel.

dibawah pimpinan pemegang gaukeng yang lazim disebut arung. Arung itu sebagai penguasa dengan wewenang kekuasaan ilahi. Karena kekuatannya merupakan wakil dari gaukeng yang mengarahkan dan menyalurkan kekuatan kekuasaan, dengan demikian arung ditempatkan sebagai pusat pengendalian kekuatan masyarakat yang sekaligus sebagai kultus kekuatan ilahi.

Bentuk pemerintahan wanua ini ternyata dalam perkembangannya tidak dapat bertahan. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kehidupan politik setiap wanua berusaha memenangkan kedudukan sebagai pemegang kendali politik terhadap wanua lainnya. Kecenderungan itu berakibat perselisihan dan perang terus menerus, ini mendasari ketidaktertiban dan kekacauan dalam kehidupan politik (bermasyarakat). Keadaan tersebut mendorong beberapa wanua berusaha menjalin hubungan politik. Untuk mengikat perjanjian kerjasama, dan bantu membantu guna menertibkan dan menjalin keamanan mereka.

To Manurung sebagai peletak dasar kerajaan dan keturunannya mendapat kedudukan tertinggi dalam pemerintahan Bone. Lapisan yang merupakan pewaris kedudukan raja, yang boleh menyimpan atribut To Manurung yang dijadikan arajang Kerajaan Bone. Dipihak lain penemu gaukeng dan keturunannya menempati kedudukan sebagai pewaris kekuasaan wanua. Dalam kegiatan pemerintahan penguasa wanua merupakan bawahan dari Kerajaan Bone.

Pembentukan lembaga-lembaga yang ditanamkan oleh Manurunge merupakan suatu pencerminan watak kebijaksanaan dalam arti luas, selain itu dibawah pimpinan beliau senantiasa melihat dan menghargai keinginan serta situasi masyarakat. Walaupun raja sebagai sentral kekuasaan akan tetapi senantiasa dibatasi kesepakatan dalam musyawarah.

Struktur pemerintahan yang telah dirintis oleh Manurunge kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh raja-raja tanpa merubah atau membentuk sistem pemerintahan yang baru. Oleh karena sistem pemerintahan yang selalu berubah-ubah (pada setiap pergantian raja) akan mengakibatkan pemerintahan yang tidak sehat. Patokan dipulihkan sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan, selain itu kekacauan akan timbul karena peraturan yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu setiap pergantian raja tidak usah lagi muncul sistem pemerintahan terdahulu agar pemerintahan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Jadi secara tradisional, di Kerajaan Bone sudah terdapat sistem politik<sup>7</sup> dan pemerintahan sendiri. Adapun susunan pemerintahan dan gelar-gelarnya serta tugas-tugas

---

<sup>7</sup>"Sistem politik adalah kegiatan-kegiatan (activities) dan proses-proses (processes) dari struktur-struktur (structures) dan fungsi-fungsi (functions) dalam negara/masyarakat yang bekerja dalam satu unit atau kesatuan" Rusadi Kautapriwira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. (Bandung: Sinar Baru, 1980), hal. 2.

nya dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Raja dengan gelar Arung Pone biasa juga disebut atau dipanggil sebagai "Petta MangkauE". Petta MangkauE berarti raja yang berkuasa dan duduk di atas takhta kerajaan. Didawah raja adalah pemerintahan biasa disebut Tomarilaleng. Yang secara harfiah berarti "orang di dalam". Ia berhak memakai gelar oleh karena memiliki hubungan dekat dan intim dalam hal pemerintahan dengan raja yang sedang berkuasa. Pada jaman sekarang, Tomarilaleng dapat disamakan dengan perdana menteri atau pemimpin kabinet. Tomarilaleng bertugas mengetuai Aru Pitue atau tujuh pangeran dan seluruh anggota hadat. Dia mengatur semua urusan menyangkut peradilan, kepolisian, rumah tangga pemerintahan dll. Hal itu berarti dia adalah presiden peradilan di Bone, baik pidana maupun perdata.<sup>8</sup>

Tomarilaleng harus berasal dari keturunan raja dan salah seorang neneknya pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan. Selama memangku jabatan itu, ia tidak diberi hak, dan tidak berhak, dipilih dan diangkat menjadi raja. Sesuai aturan yang berlaku pada waktu itu, maka tidak seorangpun yang dapat menemui raja, tanpa diketahui dan diisinkan oleh pajabat itu, sekalipun tamu

---

<sup>8</sup>Rasak Karim, op.cit., hal. 56.

itu adalah raja atau pangeran dari negeri lain. Semua harus tunduk pada peraturan itu.

Di samping kedua pejabat tersebut masih ada sebelas jabatan seperti: Ketiga, Dewan Hadat atau anggota-anggota hadat, yang terdiri dari tujuh arung atau tujuh pangerang. Dewan ini dengan Tomarilaleng sebagai pemimpinnya berkewajiban untuk memenuhi semaksimal mungkin kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan raja, kerajaan dan rakyat. Keempat yaitu Djemma Tongeng ia adalah kepala dari ke-40 orang kurir Bone yang bertugas menyebarkan atau menyampaikan perintah-perintah dan surat-surat raja dan hadat, keseluruhan penjuru kerajaan. Kelima, Anrong Guru Anak Karung, yang bertugas mendidik putra-putra raja dan bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan. Keenam, Tomalompona Towangke yang mengepalai semua towangke yakni keturunan para prajurit. Mereka adalah pasukan pengawal istana, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.<sup>9</sup> Ketujuh, Empat Anrong Guru Pukalawing Epu yang mengepalai dayang-dayang yang bertugas melayani raja baik di Istana maupun dalam perjalanan. Kedelapan, Duabelas Suro atau utusan yang bertugas mengantar surat-surat dan perintah-perintah baik

---

<sup>9</sup>Andi Pabbara dan Andi Muh. Ali, Lontarak Kerajaan Bone no. 5, (Tanpa penerbit dan tahun terbit, koleksi yayasan kebudayaan Sulawesi selatan), hal. 83.

di dalam kerajaan maupun luar kerajaan. Kesembilan, Parannung atau penyiar yang bertugas menyampaikan secara lisan pesan-pesan raja kepada pangeran-pangeran. Kesepuluh, Juru Bahasa yang terdiri dari dua orang penerjemah keba-  
hasa melayu. Kesebelas, Juru tulis sebanyak dua orang yang seorang diantaranya adalah juru tulis khusus untuk surat-surat resmi dan seorang yang lainnya untuk pembuat surat-surat pribadi raja yang ditujukan kepada anggotanya, keluarganya atau sahabatnya. Yang terakhir adalah para kepala bawahan dengan berbagai gelaran seperti: arung, anrong, guru, sulewatang, pabbicara, galla, jannang, mado, dan madanreng. Demikianlah susunan pemerintahan yang tu-  
run-temurun di Kerajaan Bone.<sup>10</sup>

Mengkhusus kepada persiapan pertahanan baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Kerajaan Bone memiliki pemimpin-pemimpin perang secara struktural. Akan tetapi kesiap-siagaan angkatan perang hanya terjadi pada saat-saat menanti datangnya serangan dari luar atau diperkirakan akan ada peperangan.

Adapun pemimpin-pemimpin yang terdapat di dalam pertahanan Kerajaan Bone adalah: 1. Ponggawae sebagai panglima, 2. Dulung dari Lamuru, Sibulue, Ajangale, Pitumpanna, Lili-ri-lau, Tellu-Limpo-ri-Awang dan Wawo-Bulu-ri-Awang, 3. Pangulu-Lompona-Joae, atau pemimpin ter-

---

<sup>10</sup>Razak Karim, op. cit., hal. 7-9.

tinggi rakyat, 4. Anrong-Suru-Pangulu-Joa, atau pemimpin-pemimpin kecil rakyat, 5. Anrong-Gurunna-Joa-Seratue, atau pemimpin seratus anak buah, 6. Anrong-Guruna-Joa-Patapuloe atau yang memimpin empat puluh anak buah. Dan Ketujuh, masih banyak lagi pemimpin-pemimpin dengan predikat kapitang-kapitang. Panglima tertinggi dalam arti militer tidak ada, yang ada hanyalah sabda raja yang harus dilaksanakan tanpa pamrih.<sup>11</sup>

Kesemua yang telah disebutkan terdahulu berfungsi pada seluruh wilayah Kerajaan Bone. Adapun wilayah Kerajaan Bone terdiri dari beberapa palili atau kerajaan-kerajaan taklukan. Kerajaan-kerajaan itu adalah: 1. Citta dengan wilayah pemukiman antara lain: Lampong, Unrengae, Belawa, Kampiri, Data, Tallo, Mardewala, dan Barang. 2. Bone Tanga yang terdiri atas; Palakka dengan pemukiman utama Cinennung, Passempe, Urang, yang biasa disebut Tellumpanuae (Tellu-Tiga, Wanua-Negeri) Awangpone, dengan pemukiman antara lain : Paccing, Matuju, Jaling, Cumpiga, dan Unra; Cina dengan pemukiman Kamplebu, Ulapao, Welanreng, Buki, Laju, Pationgi; Barebbo dengan pemukiman Wawonglangi, Cinnong, Menegallung, Lampoko, dan Bajo; 3. Ajangale atau Liliriaja yang terdiri dari; Petu Pajung Tanre dengan wilayah pemukiman utama, Mampu, Sailong, Timurung, Amali, Ulaweng, Bengo, dan Ponre; Limampanua dengan pemukiman Otting, Lanca, Ulo, Palongki dan Tajong;

---

<sup>11</sup>Ibid., hal. 10 - 11.

PatangkaiE dengan wilayah pemukiman Mampu-ri-Aja, Mampu-ri-Awa, Kung dan Sijelling; Tellumpanuae dengan tempat pemukiman Sura-sura, Alinge, dan Teamusu; Lappa-ri-Aja dengan pemukiman Libureng, Macenra, Bulu, Tea, Campaga, dan Bariengeng; Pattampidange dengan pemukiman Lamoncong, Sanrego, Teko, dan Beru; Ennenge Bila-ri-Lau dengan dengan tempat pemukiman Balli, Mico, Sancerang, Sanrong, Toja dan Saweng. 4. Lili-ri-Lau terdiri dari: Sibulue dengan tempat pemukiman Pattiro, Kaju, Cinnong, Sampobia, Kalibong, Panelli, Bulu dan Balieng; Wawo-Bulu-ri-Awang dengan tempat pemukiman Towang, Pationgi, Lemo, Paoka, Sunaba, Alla dan Cenrana; Tellu-Limpo-ri-Awang dengan yang keempat pemukiman utama Mare, Salangketo, dan Tan-ro akhirnya kerajaan Awangtangka dengan pemukiman Meru, Salomekko, Cina, Pattimpeng, Bulu-Tana, Cani dan Gona.<sup>12</sup>

Di samping Palili yang telah disebutkan masih ada lagi pemukiman yang tidak termasuk palili seperti: Malle, Pajakka, Karalla, Aralla, Bulu, Awo, Kawerang, Cellu, Biru, Balakang, Bulu, Maloi, Maduri, dan Saga. Di samping itu masih ada lagi tempat-tempat pemukiman kecil atau rumah-rumah yang letaknya terpencar-pencar di seluruh Wilayah Bone.

Namun untuk memahami kehidupan pemerintahan dan kenegaraan Kerajaan Bone pada akhir abad ke 19 dan awal

---

<sup>12</sup>Ibid., hal. 3 dan 4.

abad ke 20. Perlu kiranya memahami keberhasilan Aru Palakka mengembangkan Kerajaan Bone. Perjanjian Bungaya (18 Nopember 1667) pasal 20 menetapkan bahwa seluruh negeri yang ditaklukkan oleh kompeni Belanda bersama sekutunya selama peperangan. Mulai daerah Bulo-Bulo, Turatea, hingga ke-Bungaya menjadi milik kompeni dan sekutu-sekutunya. Sesuai dengan hukum perang yang berlaku raja Gowa tidak berhak lagi atas kerajaan taklukkan, kesemuanya menjadi milik kompeni.<sup>13</sup>

Adapun negeri-negeri yang ditaklukkan bersama Bone dan kompeni (VOC), mereka bersekutu menyerahkan pada kebijaksanaan kompeni Belanda. Kebijakan kompeni Belanda adalah meminjamkan seluruh wilayah Kerajaan Bone kepada Aru Palakka secara turun-temurun. Dari sinilah raja Bone pernah dijadikan konselir persekutuan raja-raja di Sulawesi.

Setelah Aru Palakka wafat sistem konselir dihapuskan oleh Belanda. Demikianlah Belanda dan Bone pada tanggal 13 Pebruari 1860 menyepakati kontrak politik bahwa Bone dan Lamuru berkedudukan sebagai sekutu (Bendgenootschap). Hal ini berlaku pada jaman Singkeru Rukka sampai La Pawawoi Karaeng Sigeri menduduki takhta Kerajaan Bone, bahwa Kerajaan Bone hanyalah kerajaan pinjaman (lemvorst).<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Harun Kadir dkk., Sejarah Daerah Sulawesi selatan, (Jakarta: Dep. Dik. Bud., 1976), hal. 43. Lihat juga: Abdul Rasak Dg. Patunru, Sejarah Gowa, (Makassar: Yayasan Keb. Sulawesi selatan Tenggara, 1964). hal 56.

<sup>14</sup>Ibid., hal. 57.

### C. Sistem Sosial

Keseluruhan sistem sosial yang berlaku di Kerajaan Bone, dibangun dari pola yang nampak jelas statusnya dalam masyarakat sehingga sangat mudah untuk diketahui mengenai sistem sosial. Istilah kekerabatan yang dipergunakan tidak jauh berbeda bahkan mungkin tidak berbeda sama sekali dengan istilah yang dipergunakan etnis bugis lainnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Istilah kekerabatan di daerah ini dikenal dengan istilah "Asseajingengna" berasal dari kata seajing (Kerabat) yang diberi kata tambahan esse yaitu erat. Dengan demikian Asseajingeng berarti ikatan kekerabatan yang sangat erat. Asseajingeng itu sendiri masih dibedakan atas dua jenis hubungan keluarga yaitu hubungan keluarga berdasarkan perkawinan yang disebut Siteppang dan hubungan keluarga Siwija.<sup>15</sup>

Siteppang, biasanya meliputi istri (baine) atau suami (lakka); matoa riale (ibu/ayah kandung, istri/suami ego), ipa'na burane (saudara kandung laki-laki istri ego), ipa'pada' kunrai (saudara kandung perempuan istri ego). Hal ini sering juga disebut siteppang maddeppe. lebih dari pada itu biasanya keluarga dekat dari istri

---

<sup>15</sup> Aminah Hamzah dkk., Biografi Pahlawan La Pawawoi Karaeng Sigeri, (Jakarta: Dep. Dik. Bud., 1993), hal. 14.

atau suami juga disebut siteppang. Siwija biasanya terdiri atas ayah atau ibu kandung, ana'dara (saudara perempuan) atau padaoroane (saudara laki-laki), amaure (saudara laki-laki ayah dan ibu), anure (anak kandung dari saudara laki-laki atau perempuan ego), sapposiseng (sepupu satu kali), sappokadua (sepupu dua kali), sappo katellu (sepupu tiga kali). Keseluruhan status dan istilah yang tertera di atas masih dinamakan masyarakat kabupaten Bone (Bugis sebagai siwija).<sup>16</sup>

Masyarakat bugis pada umumnya menganut prinsip sistem kekerabatan yang bilateral dan parental, yaitu disamping mengikuti garis keturunan Ibu juga mengikuti garis keturunan Ayah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga garis keluarga masyarakat Kabupaten Bone (Bugis) sangat luas dan kadang menimbulkan suatu ikatan kekeluargaan dikalangan masyarakatnya. Oleh sebab itu sering atau biasanya tiap penduduk atau individu menganggap diri sebagai bagian dari penduduk sekampungnya.<sup>17</sup>

Sedangkan penyelenggaraan hidup dalam masyarakat Kerajaan Bone dapat diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan, keadaan masyarakat dan kehidupan seni budaya serta alam pikiran dan kepercayaan. Pertama, masyarakat Bone dalam memenuhi kebutuhannya adalah bertani sawah

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Andi Babbara dan Andi Muh. Ali, op. cit., hal. 18.

dan ladang serta penangkapan ikan air tawar maupun ikan laut. Kedua, keadaan masyarakat Bone masih dalam keadaan feodalisme yang membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan: bangsawan, merdeka, dan budak. Perkembangan hidup dan kehidupan sangat tergantung dari status tersebut. Jika statusnya tinggi akan tetap berkembang secara cepat demikian pula sebaliknya. Ketiga, kehidupan seni dan budaya di Kabupaten Bone dapat dipahami dalam pendidikan dan keseniannya. Pendidikan pada abad ke 19 dilakukan secara perorangan dari orang tua pada anaknya dengan mata pelajaran seperti pelajaran sastra, pelajaran ilmu-ilmu kebatinan, pencak silat dan ilmu-ilmu lain. Pendidikan semacam ini hanya diberikan pada mereka yang orang tuanya dianggap mampu dan terkemuka. Pendidikan yang lebih demokratis adalah pengajian al *Qur'an*, setiap pria maupun perempuan dapat mengikutinya. Walaupun pelajaran dapat diberikan secara perorangan, akan tetapi seorang guru biasanya menghadapi banyak murid. Mereka tidak dipungut biaya akan tetapi membantu sang guru untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.<sup>18</sup>

Demikian juga dengan pendidikan agama yang lebih lanjut biasanya dimulai dengan pelajaran ilmu bahasa arab kuno. Pelajaran itu diberikan oleh seorang kiai atau syekh. Begitu pula dengan kiai biasanya bukan saja

---

<sup>18</sup> Harun Kadir dkk., *op. cit.*, hal. 65.

pelajaran mengaji saja akan tetapi pelajaran seperti pencak silat, ilmu kebatinan dan ketabiban juga diberikan kepada murid-muridnya.<sup>19</sup>

Cabang-cabang kesenian yang terdapat di Kerajaan Bone adalah seni sastra, seni suara, seni tari dan seni ukir. Peristiwa-peristiwa kepahlawanan biasa disebut dalam bentuk syair patriotik yang berupa elong (nyanyi) dan solo (epos) bermunculan. Seni suara dan seni tari pun hampir sama perkembangannya dengan seni suara elong masalah (nyanyian masalah), nyanyian ini dilakukan pada wanita setelah selesai shalat isya. Elong masalah diintroduksikan oleh tarekat chalwatiah yang berkembang sampai di luar kerajaan. Mengenai tari, di Bone membedakan tarian istana dan tarian rakyat. Tarian istana lazimnya disebut tari pajaga. Tarian istana yang bersifat ritual dan dihubungkan dengan dewata adalah tari lolosu. Tarian ini dimasukkan oleh para bissu, tapi bisa juga oleh putri-putri bangsawan. Tari pajaga hanya dilakukan untuk tontonan raja, keluarganya serta para bangsawan. Kemudian tarian rakyat biasa disebut pajogek yang diperlihatkan kepada rakyat jelata. Penarinya terdiri dari wanita hamba sahaya raja yang reputasi kesusilaannya tidak begitu tinggi.<sup>20</sup>

Meskipun masyarakat Bone telah kurang lebih tiga

---

<sup>19</sup>Ibid., hal. 66

<sup>20</sup>Ibid.

ratus tahun beragama islam. Namun kepercayaan-kepercayaan yang merupakan sisa-sisa dari jaman pra Islam masih ada. Kepercayaan itu seperti pelbagai takhayul, kepercayaan kepada manurung dari langit atau pertiwi, tentang hari baik dan hari naas dan lain-lain yang tidak serasi dengan ajaran islam murni, masih melekat pada rakyat Bone.

## BAB III

LA PAWAWOI KARAENG SIGERI MENDUDUKI TAKHTA  
KERAJAAN BONEA. Pemilihan Raja Bone XXXI

Suksesi atau pengalihan kekuasaan di Kerajaan Bone terjadi dari Fatimah Banri kepada La Pawawoi Karaeng Sigeri sebagai raja Bone ke 31. Kejadian itu berlangsung pada tahun 1895 karena Fatimah Banri meninggal dunia. Atas mangkatnya ratu Fatimah Banri maka ada tiga calon raja di Bone yaitu La Pawawoi Karaeng Sigeri selaku adik Fatimah Banri, I Magguliga Karaeng Popo (Putra somba ri Gowa I Malingkaang) selaku suami Fatimah Banri, dan Bunga Sutra Arung Apala selaku putri Mahkota dari raja Fatimah Banri.<sup>1</sup>

Sepeninggal Fatimah Banri maka terjadi suasana politik yang tegang diantara dewan pemerintahan dan golongan bangsawan tinggi di Bone.<sup>2</sup> Hal itu disebabkan oleh I Magguliga Karaeng Popo yang merasa berhak menduduki takhta Kerajaan Bone. Dia merasa berhak karena garis keturunan ibundanya yakni Tenripadang Arung Barru yang

---

<sup>1</sup>Lontarak Akkarungeng, (Watampone, 1985), hal. 169.

<sup>2</sup>Aminah Hamzah dkk., Biografi Pahlawan La Pawawoi Karaeng Sigeri, (Jakarta: Dep. Dik. Bud., 1993), hal. 48.

bersaudara kandung dengan Arungpone Singkeru Rukka. Maka beliau berusaha menjadi raja sebagai pengganti almarhumah atau isterinya. Akan tetapi, usaha itu mendapat tantangan dari pihak La Pawawoi Karaeng Sigeri yang pada waktu itu menjadi Punggawa sekaligus Tomarilaleng Kerajaan Bone. Untuk menetralsir suasana politik tersebut, Dewan Adat Tujuh memutuskan pilihan pada Bunga Sutra Arung Apala dari putri mahkota yang menjadi raja. Bunga Sutra Arung Apala biasa juga disebut Besse Sutra Bau Bone Arung Apala,<sup>3</sup> yang waktu itu masih berumur 13 tahun. Oleh karena masih kecil, maka yang melakukan pemerintahan sehari-hari adalah pamannya La Pawawoi Karaeng Sigeri.<sup>4</sup>

Dari terangkatnya putri mahkota sebagai Arungpone dan walaupun La Pawawoi Karaeng Sigeri yang berfungsi sebagai raja, namun gubernur Makassar yang waktu itu adalah Bram Morris (Belanda) tidak menghendaki demikian. Sikap Belanda itu dilandasi oleh anggapan bahwa jangan sampai ayah putri mahkota dapat berpengaruh menyatukan kekuatan politik Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Dengan demikian jika hal itu terjadi, maka kekuasaan Belanda akan tergeser di Sulawesi Selatan.

---

<sup>3</sup>Lontarak Akkarungeng, (Wapampono, 1985), hal. 169.

<sup>4</sup>Andi Muin MG., Menggali Nilai Kebudayaan Sulselra, Siri dan Pacce, (Makassar: SKU Makassar Press, 1977), hal. 59.

Dari strategi politik Belanda tersebut, maka gubernur Sulawesi di Makassar mengadakan perundingan dengan dewan Ade Pitue atau adat tujuh. Perundingan berhasil memutuskan pengangkatan Arungpone yang baru. Dari usaha politik Belanda tersebut, maka tercapailah kata sepakat untuk membatalkan pilihan dewan adat tujuh dan mengangkat La Pawawoi Karaeng Sigeri, yang pada waktu itu usianya sudah berumur 60 tahun.<sup>5</sup>

#### B. La Pawawoi Karaeng Sigeri Sebagai Raja Bone ke-31

Setelah La Pawawoi Karaeng Sigeri menduduki takhta kerajaan Bone, maka Karaeng Popo meninggalkan Bone menuju Kerajaan Gowa. Dia dilarang oleh Belanda untuk mengunjungi Kerajaan Bone, kemudian beliau wafat pada tahun 1902. Demikian pula dengan putrinya Besse Sutra Bau Bone Arung Apala tetap tinggal di Bone dan wafat pada tahun 1903.<sup>6</sup>

Pada tanggal 16 Pebruari 1896, La Pawawoi menandatangani perjanjian bunggaya, yang diperbaharui Belanda

---

<sup>5</sup> Aminah Hamzah dkk, op. cit., hal. 49.

<sup>6</sup> Ibid., juga baca: Lontarak akkarungeng, op. cit., hal. 166, antara lain disebutkan sebagai berikut: "Belum disetujui persatuannya adat di Bone, sebab dikawatirkan keamanan umum raja Bone."



selaku raja pinjaman sebagaimana ayahnya.<sup>7</sup> Dengan demikian Belanda menaruh harapan untuk dapat menguasai Kerajaan Bone akibat beban moril bantuan Belanda sewaktu pengangkatan raja dan penandatanganan perjanjian tersebut. Akan tetapi harapan itu ternyata meleset karena walaupun sudah tua, beliau masih memimpin Kerajaan Bone sebagaimana layaknya seorang raja waktu itu. Garis koordinasi secara politik sangat nampak, para dulung sangat tunduk pada pemerintah raja, dan punggawa kerajaan serta dewan Ade Pitue.

Pada masa pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri ini, Kerajaan Bone bergiat mengembangkan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di teluk Bone, seperti Wajo, Luwu, Buton dan Muna (Sulawesi Tenggara) serta menjadikan pelabuhan Bajoe dan Pallime sebagai pusat perdagangan ekspor ke Singapura berupa barang-barang hasil bumi, hutan, dan laut. Beliau berhasil meningkatkan pengaruh di Sulawesi selatan, Tenggara bahkan Belanda menganggap Kerajaan Bone sebagai kerajaan yang paling kuat pada masa itu.<sup>8</sup>

Akibat kemajuan yang dicapai melalui pelabuhan Bajoe dan Pallime sebagai bandar niaga Kerajaan Bone.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Lahadjji Patang, Sulawesi dan Pahlawan-pahlawannya, (Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia, 1967), hal. 22.

Dari itu, Belanda tertarik serta beberapa kali meminta izin kepada beliau untuk mendirikan kantor dagang di kedua pelabuhan tersebut. Tetapi beliau selalu menolak. Penolakan itu didasari oleh pengetahuan raja terhadap tingkah laku politik adu domba Belanda dalam usaha menancapkan imperialisme dan kolonialisme Belanda pada Kerajaan Bone. Hal itu sudah lama terbukti pada raja-raja sebelumnya, yang terkenal dengan perang Bone pertama (1824-1825, dan perang Bone kedua (1859-1860).<sup>9</sup>

Sebelum La Pawawoi menjadi Arungpone, beliaupun memiliki perjalanan karir tersendiri. Beliau lahir pada tanggal 12 Pebruari 1826 di Kalukubodoa (Tallo). Sewaktu kecil dia dipelihara oleh neneknya. Bau Maddellung Karaeng Bontomasugi (ratu putri di Tallo) yang juga arung di Lipukasi (Tanete). Setelah ia akil balig menyertai ibunya I koloeong Karaeng Langello dan tetap tinggal di Lipukasi. Di sini sering kali bepergian dengan bibinya ke Barru I Tenripadang yang menjadi arung di Barru yang juga saudara kandung dari Arungpone Singkeru Rukka Matinroe ri Topa'cing. Kemudian setelah mulai dewasa mendapat gelar Karaeng Sigeri dalam tahun 1844. Tidak lama kemudian di Barru, dia pergi ke Bone karena dipang-

---

<sup>9</sup>Andi Muh. Ali, Bone Selayang Pandang, (Watampone, Percetakan Damai, 1986), hal. 11.

gil oleh ayahandanya. Atas persetujuan Belanda dia diangkat oleh ayahandanya Singkeru Rukka Arung Palakka menjadi Arung di Bulo-Bulo (Sinjai) pada tahun 1857. Ayahnya menjadi Arungpone sejak tahun 1850, setelah menjadi Arung Bulo-Bulo kemudian pada tahun 1862 diangkat menjadi dulung Ajangale (Penguasa atau gubernur di daerah Ajangale). Dalam tahun 1970 beliau menjadi Arung Mampu dan Arung Sijelling.<sup>10</sup>

Dalam tahun 1876, yakni pada masa pemerintahan kakaknya Fatimah Banri, La Pawawoi Karaeng Sigeri diangkat menjadi Punggawa di Bone atau mengepalai angkatan perang kerajaan Bone. Dalam tahun itu juga, beliau bersama-sama dengan pasukan bugisnya turut pada tentara Belanda pergi ke Turatea (Binamu, Bangkala, dan lain-lain) untuk menumpas pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Belanda.<sup>11</sup>

Pada masa pemerintahan Fatimah Banri hubungan antara La Pawawoi Karaeng Sigeri dengan Belanda sangat baik, yakni sewaktu menjadi Punggawae Kerajaan Bone.<sup>12</sup> Bentuk kerjasama disamping yang telah disebutkan di atas juga bantuan La Pawawoi Karaeng Sigeri kepada Belanda

---

<sup>10</sup> Abdurrasak Daeng Patunru dkk., Sejarah Bone, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sul-Sel, 1989), hal. 271.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Andi Muh. Ali, op. cit., hal. 68.

adalah pada penumpasan pembontakan I Maru Karaeng Bonto-Bonto sewaktu pemerintahan petoro marusu di daerah Pangkajene terhadap Belanda. Bantuan itu dilakukan atau diberikan sampai berakhirnya pembontakan pada tahun 1877.<sup>13</sup>

Disamping sebagai Punggawae, beliau di angkat juga menjadi Tomarilalang. Tercatat pula bahwa beliau pernah diutus oleh Gubernur Makassar Backer ke Luwu untuk mengurusakan Datu Luwu Andi Baru Sultan Abdul Karim supaya menandatangani perjanjian Bungaya yang telah diperbaharui. Usaha ini membuat Datu Luwu (Ayahanda dari Latu We Kambo Daeng Risompa) pada akhirnya menandatangani perjanjian tersebut.

Selain itu, bukti kerja sama dan hubungan baik La Pawawoi Karaeng Sigeri tersebut, juga beliau pun dianugrahi bintang kehormatan itu diterima pada tanggal 31 Agustus 1896.<sup>14</sup> Selanjutnya pada tahun 1896 tibalah waktunya beliau diangkat menjadi Arungpone. Setelah Dia menjadi raja maka andi Baso Pagilingi atau Abdul Hamid anaknya diangkat menjadi seorang punggawa Kerajaan Bone.

Sehubungan dengan La Pawawoi Karaeng Sigeri tidak dapat dan tidak mau begitu saja didikte oleh Belanda, maka Belanda sangat kecewa dalam harapannya. Belanda se-

---

<sup>13</sup>Lontarak Akkarungeng, *op. cit.*, hal. 167.

<sup>14</sup>Sarita Pawiloý, *Arus Revolusi 1945-1950 di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Dewan Harian '45, 1987), hal. 45.

lalu mengharapkan agar La Pawawoi Karaeng Sigeri dapat dipengaruhi oleh Belanda. Setelah menjadi raja La Pawawoi Karaeng Sigeri ternyata tidak mudah dipengaruhi begitu saja oleh Belanda, sehingga Belanda sangat kecewa dalam kemauan dan harapannya. Kemudian berbagai tuduhan dilimpahkan kepada La Pawawoi Karaeng Sigeri. Tuduhan itu antara lain adalah: 1. Bahwa baginda dengan sewenang-wenang dan dengan sekehendak hatinya mencampuri perselisihan Kerajaan Luwu dan Enrekang, 2. Bahwa baginda sering melakukan campur tangan dengan kekuatan bersenjata dan melakukan atau menyuruh melakukan perampokan-perampokan di daerah-daerah kerajaan lainnya serta selalu menentang kekuasaan Belanda, 3. Bahwa Kerajaan Bone di bawah pemerintahan Baginda merajalela kesewenang-wenangan dan ketidakadilan atau sebaliknya, dan 4. Bahwa baginda tidak mentaati perjanjian yang telah ditandatangani terutama tentang hak memungut bea cukai dan sebagainya.<sup>15</sup>

Hal itu sebagai akibat dari keinginan Belanda yang senantiasa berusaha memperluas kekuasaannya dan sebaliknya memperkecil hak-hak dan kekuasaan Kerajaan Bone. Akan tetapi La Pawawoi Karaeng Sigeri tetap mempertahankan legitimasi Kerajaan Bone. Hal itu terlihat

---

<sup>15</sup> Aminah Hamzah dkk., *op. cit.*, hal. 52.

dalam perintah Baginda dan tanpa persetujuan pemerintah Belanda di Makassar, pada tahun 1897 kepada punggawanya beserta lasykar berangkat ke Toraja untuk membantu masyarakat. Pada saat itu lasykar Bone membantu orang Toraja dalam melawan orang-orang Enrekang. Karena telah lama orang-orang Enrekang selalu menangkap orang-orang Toraja untuk dijual di daerah Bugis dan Makassar, atas bantuan punggawa Bone Baso Abdul Hamid, perdagangan budak itu dapat dihapuskan dan keamanan dapat dipulihkan.<sup>16</sup>

Tidak lama berselang dari peristiwa yang diceritakan di atas, muncul pula perselisihan antara Arungpone dengan arung Peneki. Arung Pebeki La Oddang Datu Larompong selalu menghalang-halangi pemasukan garam milik Arungpone ke Wajo melalui sungai Cenrana. Perselisihan ini, membuat punggawa Bone langsung menyerang Datu Larompong, akan tetapi tidak ada di tempat. Kemudian Petta Punggawae bersama lasykarinya menyusul ke Sengkang, karena pada saat itu Datu Larompong berada di sana. Pertempuran terjadi yang berakhir dengan pembakaran kota Sengkang oleh orang-orang Bone dibawah pimpinan Baso Abdul Hamid.<sup>17</sup>

Persoalan pokok sehingga La Pawawoi Karaeng Sigeri

<sup>16</sup> Abd. Rāsak Dg. Patunru dkk., op. cit., hal. 274.

<sup>17</sup> Ibid.

melakukan perselisihan dengan Belanda adalah sesungguhnya Belanda ingin menguasai sepenuhnya Kerajaan Bone. Permulaan perselisihan itu terjadi pada tahun 1900 yakni setelah harapan Belanda dalam menguasai dua pelabuhan Bone yakni Bajoe dan Pallime gagal dan juga hak-hak pemungutan bea cukai tidak dipenuhi. Dengan demikian tuntutan itu ditolak oleh raja dan *Ade Pitue* Kerajaan Bone karena posisi pendapatan perekonomian kerajaan berada di kedua pelabuhan tersebut.

Dari itu *La Pawawoi* tetap mempertahankan kerajaannya walaupun apapun yang harus ditanggungnya. Hal itu dapat terlihat dari sumpah *Petta Ponggawae Baso Abdul Hamid* sebelum berangkat ke medan perang. Adapun sumpah setia tersebut berbunyi: "*Ita mai la-puang Batar tungke'na Bone, maringkalinga maneng, sinitau maegae, munyilito sini bajiedae, iyyaaremuga bola Petta punggawa Bone, Petta Massollasollae, Petta Laleangkurue, temmenajae sunge'ku mattikka ri pammassareng.*" (Lihatlah patik, tuanku raja Bone dan dengarlah wahai semua orang banyak serta saksikan pula ratu dan putri yang berbaju merah, inilah Punggawa Bone yang tak sayang jiwa raganya walau ke akhirat sekalipun. Dengarlah Tuanku raja yang kujunjung, ada tiga sebab maka patik pegang teguh dalam berbakti: 1. Memang patik adalah hamba di Bone, 2. diangkat pula menjadi panglima pasukan, dan 3. Tuan-

ku melahirkan patik didalam keadaan suka dan dukanya Bone). Apabila patik didesak mundur oleh Belanda Si putih mata lebih baik patik memasang saja kain kaffan masuk kelapis tanah sukma patik menyebrang ke akhirat.<sup>18</sup> Demikianlah, tanggapan para politisi kolonial dan imperialisisme Belanda. Dari pendirian itulah sehingga terjadi perang Bone 1905.

Pada tanggal 18 Juli 1905 armada Belanda tiba di pelabuhan Bajoe di bawah pimpinan Kolonel C.A. Van Loenen tersebut; di sanalah berlabuh kapal-kapal Belanda de Goen, Bromo, H. M. Hertog Hendrik, Koningin Regentes, de Ruyter, Seeland, Borneo, Asahan, Serdang, Brak, Tjantik II, dan Argus. Mereka memilih Pattiro sebagai pelabuhan pendaratan pasukan karena sepanjang pantai Bajoe masuk kepedalaman banyak terlihat benteng pertahanan Bone. Pada tanggal 19 Juli 1905 pagi-pagi kolonel Van Loenen sebagai panglima ekspedisi mengirim ultimatum kepada Arungpome. Dalam surat yang dibawah oleh La Patola Daeng Masappo itu, Belanda memberi tempo selama dua puluh empat jam dalam memenuhi tuntutanannya. Karena ultimatum tidak dijawab memuaskan oleh Arumpone maka pada tanggal 20 Juli 1905 pasukan-pasukan Belanda mulai mendarat di Pattiro komandan dan ekspedisi turut juga mendarat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 276.

<sup>19</sup> Ibid., hal. 277.

## BAB. IV

## PERANG BONE. 1905

A. Penyebab Munculnya Konflik

Serangan umum Belanda pada Kerajaan Bone terjadi pada tanggal 21 Juli 1905,<sup>1</sup> mulai saat ini Kerajaan Bone dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Kejadian ini terjadi sebagai akibat ketegangan antara Belanda sebagai penjajah di Hindia Belanda dengan Kerajaan Bone sebagai salah satu kerajaan lokal di Sulawesi selatan. Ketegangan antara kedua belah pihak sudah jelas ada sebab-sebab yang melatar belakangnya.

Sejak pergantian gubernur jenderal J.B. Van Heusz pada tanggal 1 Oktober 1904, maka tujuan pokok politik kolonial Belanda adalah menguasai secara langsung seluruh wilayah jajahan. Demikianlah pergantian politik kolonial, terjadi kebijakan dari liberalisme kepada politik etis (1870-1900). Politik etis (Pendidikan, perpindahan penduduk, pengairan)<sup>2</sup> berjalan tidak sebagaimana mestinya. Pada saat ini konflik lokal atau perang saudara dijadikan dalil untuk melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Bone.

---

<sup>1</sup> Andi Muh. Ali, Rumpa'na Bone. Perang Bone 1905, (Watampone: Percetakan Damai, 1984), hal. 19.

<sup>2</sup> M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 228.

Sejak kemunduran politik kerajaan Gowa yang mulai surut pada perang Makassar 1667. Kekuatan politik beralih kepada kerajaan Bone sejak berkuasanya Arung Palakka sampai pada berkuasanya La Pawawoi Karaeng Sigeri.

Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukan pendudukan Sulawesi untuk memaksa kerajaan Bone untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemaksaan ini diwujudkan dengan pernyataan pendek (Korte Verklaring) yang disodorkan. Adapun isi pernyataan itu adalah: 1. Raja-raja tersebut mengaku tunduk kepada pemerintah Belanda, 2. Mengaku daerah kerajaannya sebagai bagian dari pada wilayah Hindia Belanda, 3. Tidak akan berhubungan dengan pemerintah asing tanpa seijin pemerintah Belanda.<sup>3</sup>

Pernyataan tersebut ditambahkan pula dengan suatu tuntutan yang berisi mengharuskan pemerintah kerajaan Bone menandatangani ketentuan penyerahan kepada pemerintah Hindia Belanda persetujuan ganti rugi pelaksanaan penarikan pajak hak dapat dan dapat serta mengakui hak pemerintah Hindia Belanda dalam pelaksanaan penguasaan pelabuhan dan polisi pelabuhan dalam daerah kerajaan Bone.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muh. Abduh dkk., Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi selatan, (Jakarta: Dep. Dik Bud., 1985), hal. 97.

<sup>4</sup> Harun Kadir dkk., Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi selatan, (Ujung pandang: Bapeda sulsel dan LP UNHAS, 1984), hal. 67.



Pernyataan tersebut merupakan usaha untuk menciptakan tujuan perluasan kekuasaan Belanda. Adapun usaha itu adalah: 1. Menciptakan keamanan untuk menjamin berhasilnya usaha penanaman modal swasta Belanda pada modal asing lainnya di Indonesia, 2. Menguasai tanah yang berpotensi untuk usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal usaha swasta di Indonesia, dan 3. Mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya di Kerajaan-kerajaan luar Jawa.<sup>5</sup>

Tuntan yang diajukan Belanda ditolak oleh Hadat tujuh Kerajaan Bone. Isi penolakan itu disampaikan oleh perutusan kerajaan yang berisi bahwa semua usaha-usaha untuk membawa Kerajaan Bone kepada pemikiran yang lebih baik, haruslah dipandang tidak bermanfaat. Negeri Bone sudah tertutup bagi ekspor dan impor.<sup>6</sup> Akibat dari penolakan itu maka Belanda melakukan penyerangan dengan nama ekspedisi Bone terhadap Kerajaan Bone.

B. Penyerangan Belanda Terhadap Kerajaan Bone

Dari penolakan Kerajaan Bone, maka pada paruh pertama abad ke 20 pemerintah Belanda mengirim ekspedisi ke pelabuhan Bajoe dan Pallime (Kerajaan Bone). Rencana penaklukan Sulawesi, Hindia Belanda mempersiapkan pasukan pendudukan ditiga tempat yakni: Pertama, Jawa Barat diberangkat

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Ibid.

pada tanggal 11 dan 13 Juli 1905, kedua, Jawa Tengah diberangkatkan pada tanggal 13 dan 15 Juli 1905, dan ketiga, Jawa Timur diberangkatkan pada tanggal 13 dan 15 Juli 1905 dari Surabaya.<sup>7</sup>

Pada pertengahan bulan Juli 1905 kompeni Belanda mengirim ekspedisi dari Jawa dengan suatu armada perang. Armada perang itu terdiri dari 17 buah kapal perang dan kapal pengangkut pasukan dengan lengkap persenjataannya. Armada ini dipimpin oleh panglima operasi kolonel Infantri Van Der Wedden dan wakilnya kolonel Infantri C.A. Van Loenen serta panglima tempur kolonel Kaveleri Ihr L.D.C de Lamoy.<sup>8</sup> Pemberangkatan itu untuk menundukkan pemerintah tradisional Kerajaan Bone. Mereka menuju Bajoe sebagai pusat bandar Kerajaan Bone.

Pada tanggal 18 Juli 1905, pasukan ekspedisi pendudukan sulawesi yang berjumlah 25 kapal yang berlabuh di pantai Bajoe dengan jarak kurang lebih 5000 meter dari pantai. C.A. Koessen selaku Gubernur Sulawesi dan daerah taklukan pada tanggal 21 Juli 1905 memerintahkan pendaratan utusan Hindia Belanda kepada raja Bone.<sup>9</sup> Akan tetapi utusan itu tidak mendapatkan kesepakatan dengan

---

<sup>7</sup> Ibid., hal. 68.

<sup>8</sup> Lahadjdji Patang, Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia, 1967), hal. 24.

<sup>9</sup> Harun Kadir dkk, op. cit., hal. 67.

pihak pemerintah Kerajaan Bone. Dari inilah pihak Belanda menjalani atau melanjutkan ekspedisi dengan jalan kekerasan yakni menyerang kerajaan Bone.

Hal itu membuktikan bahwa politik etis atau pembayaran utang kehormatan yang dicanangkan hanyalah sebuah cita-cita atau idealisme belaka. Dengan demikian adalah benar apa yang dikatakan bahwa ekspedisi itu sebagai manifestasi tirani, barbarianisme dan perampasan yang kejam.<sup>10</sup> Hal itu terlihat dalam perang dan pengejaran terhadap elit politik atau para bangsawan kerajaan Bone sampai ditaklukkannya.

### C. Perjuangan Mempertahankan Kerajaan Bone

Sebelum penyerangan yang dilakukan oleh imperialisme Belanda, pihak kerajaan Bone telah melakukan persiapan perang. Untuk menjaga politik adu domba yang selalu dilakukan Belanda, maka raja Bone selalu mengadakan kontak atau menjalin hubungan persahabatan dengan para raja kerajaan lain di Sulawesi. Disamping itu juga, membentuk persatuan dan koordinasi kedalam secara struktural, yaitu memelihara hubungan persatuan dengan dewan Ade Pitue, Ponggawae, para kepala-kepala dulung dan para arung palili

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme II, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 29.

serta para pembesar atau bangsawan kerajaan lainnya.<sup>11</sup>

Disamping itu, raja Bone atas dukungan dewan adepitue dan panglima tertinggi kelasykaran Bone, juga mengusahakan pembelian persenjataan di Singapura, dan juga mengadakan latihan serta mempertegas wilayah penugasan pada para dulung atau panglima daerah. Persiapan itu seperti: 1. Dulung Awatangka, mempertanggungjawabkan wilayah pertahanan Bone selatan meliputi daerah Mare ke selatan sampai Kahu-Cina, terutama perbatasan dengan Sinjai untuk mengawasi gerakan serdadu musuh di Balanipa; 2. Dulung Lamuru mempertanggungjawabkan wilayah pertahanan barat meliputi daerah Bengo ke barat termasuk Libureng, Lamuru yang berbatasan dengan Soppeng dan Camba; 3. Dulung Ajang Ale, mempertanggungjawabkan wilayah pertahanan Bone utara meliputi daerah Timurung, Sailong, ke Cendrana yang berbatasan dengan Wajo; 4. Ponggawae atau panglima tertinggi yang didampingi oleh pangulu lompona Bone, Anreguru anak Arung dan pangulu Gowa mempertanggungjawabkan pertahanan Bone tengah yang lasim disebut "Lise Pajung" di bawah naungan payung meliputi daerah Ciha ke utara sampai Awangpone dan Palakka.<sup>12</sup>

Persiapan itu dimaksud untuk mempertahankan kerajaan Bone dari jemahan kolonialisme Belanda. Disinilah

<sup>11</sup> Andri Muh. Ali, *op. cit.*, hal. 12

<sup>12</sup> Ibid.

awal perjuangan untuk membebaskan kerajaan dari kekuasaan Belanda. Perjuangan adalah perkelahian (merebut sesuatu), peperangan, teman seperjuangan, kawan berjuang, teman dalam berjuang (peperangan).<sup>13</sup> Semuanya dibenahi untuk menjaga kehormatan hegemoni Kerajaan Bone di Sulawesi selatan dan menjaga legitimasi elit politik kerajaan lokal pada saat itu.

Sikap raja Bone sewaktu menunggu kedatangan Belanda betul-betul tidak mau berunding. Dia berkata "Kita akan menghajar Belanda itu! Berdebah kotor itu! kita telah mengalahkan semua musuh dengan pasukan kita, kita punya seorang panglima yang mengenal semua liku-liku jalan di Bone."<sup>14</sup> Hal inilah yang menjadi pendirian La Pawoi Karaeng Sigeri, karena beliau banyak mengetahui kelicikan Belanda.

Kerajaan Bone, telah bersiap menghadapi kedatangan pasukan Belanda dengan segala kemungkinannya. Sejak tanggal 19 Juli 1905,<sup>15</sup> Daeng Situru perwira yang bertugas menjaga pantai di Bajoe telah dilaporkan apa yang dilihatnya. Bersamaan dengan itu, perutusan Belanda datang menghadap raja, akan tetapi raja menolak atas nama musyawarah Dewa

---

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 424.

<sup>14</sup>H.J. Friedercy, Sang Jenderal, (Jakarta: Grafitti, 1991) hal. 156.

<sup>15</sup>Andi Muh. Ali, op. cit., hal. 13.

Adat Tujuh Bone. Dari penolakan inilah para pembesar kerajaan mengadakan konsolidasi pada hari Kamis 20 Juli 1905.<sup>16</sup> Mereka bersama-sama berkumpul di Lalebata Watampone<sup>17</sup> menuju Bajoe, sambil melakukan osong atau mengucapkan syair dan pantun menyobngsong musuh.

Dalam usaha mempertahankan Kerajaan Bone dari jemaah kolonialisme Belanda nampak para pembesar dan penguasa Kerajaan Bone bersumpah "Mangaru" yaitu pengucapan sumpah setia terhadap raja Bone sambil mengacung-acungkan hunusan senjatanya. Namun sebelum mereka bubar, terlebih dahulu mendengarkan pesan dari raja agar tidak membiarkan penjajah menguasai Kerajaan Bone. Perhatikanlah ketepatan bidikmu dan lajunya dan dorongan tombakmu pada musuh. Dan kepada para pimpinan lasykar agar senantiasa membangkitkan semangat juang para lasykar dalam mempertahankan kemerdekaan negara atau Kerajaan Bone dari penjajahan.<sup>18</sup>

Ditengah-tengah kesiapan Kerajaan Bone untuk berperang dengan Belanda, dengan tergesa-gesa memperhitungkan kekuatan Belanda. Sebagaimana tujuan awal Belanda yakni mau menguasai pos perekonomian Kerajaan Bone di pelabuhan Pallime dan Bajoe.<sup>19</sup> Di balik ini Belanda

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Lalebata Watampone adalah ibu kota Kerajaan Bone.

<sup>18</sup> Andi Muh. Ali, op. cit., hal. 16.

<sup>19</sup> Abdul Razak Dg. Patunru, Sejarah Gowa, (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi selatan Tenggara, 1964), hal. 116.

pula mengusahakan Bone agar bentrok dengan kerajaan tetangganya, dengan alasan raja Bone banyak mencampuri urusan kerajaan-kerajaan tetangganya.

Menurut Andi Muh. Ali dalam Rumpa'na Bone menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 1905 mulai terjadi tembak menembak dari kapal Belanda.<sup>20</sup> Selanjutnya sampai tanggal 28 Juli 1905, Belanda mendaratkan pasukan marsosenya dan berusaha mematahkan perlawanan kelasykaran Bone. Akhirnya Bajoe dapat dikuasai oleh Belanda setelah lasykar kerajaan berusaha mempertahankan pelabuhan kerajaan itu dan dapat dipukul mundur sampai mereka bertahan di daerah Cellu dan segera mereka mengadakan konsolidasi pasukan. Akibat dari pertempuran itu maka tercatat nama-nama yang gugur seperti: La Madde-pungeng Toang Sipulung Dulung Ajangale, Daeng Matteppo Arung Bengo, Macca Daeng Majeppu Arung Melle, Arung Sigeri -sepupu sekali raja Bone, dan yang luka adalah Dg. Riolo Sulewatang Cina, I Musu Dg Sitaba.<sup>21</sup> Sedangkan dipihak Belanda banyak yang terbunuh khususnya seperti yang digambarkan dalam bukunya H.J. Friedericy.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Muh. Ali, *op. cit.*, hal. 19.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>22</sup> H.J. Friedericy, *op. cit.*, hal. 170-174.



Pada tahun 1905 penduduk asli Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 37 juta jiwa. Orang-orang Eropah bertugas pada angkatan darat dan angkatan laut kolonial Hindia Belanda pada waktu itu seluruhnya hanya berjumlah 15.866 orang perwira dan prajurit. Akan tetapi, orang bumi putra yang bertempur dipihak mereka berjumlah 26.276 orang. Sebagian bertugas dalam angkatan darat (24.522), dan 68 persen diantaranya adalah orang-orang Jawa, 21 persen orang Ambon, dan sisanya adalah orang Sunda, Madura, Bugis dan Melayu.<sup>23</sup> Sedangkan pasukan Kerajaan Bone waktu itu, diperkirakan oleh C.H. Kies sekitar 7000 orang, sedang menurut Abd Rasak Dg Patunru pasukan Bone sebesar 2000 orang.<sup>24</sup>

Setelah pasukan pertahanan Kerajaan Bone gagal mempertahankan pelabuhan Bajoe raja dan keluarga istana berpindah ke daerah Palakka dari Lalebbata Watampone. Belanda mandesak terus pertahanan Bone, Perang berubah menjadi pertempuran frontal. Perang frontal terjadi dari Bajoe, Tippulue, Benne, Taro, Pakanrebata, Lalebbata sampai ke Watampone pusat kerajaan dan komando perang.

Perang frontal berlanjut ke Palakka, dimana raja dan para pembesar kerajaan berpindah dari Watampone yang

---

<sup>23</sup> M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 223.  
<sup>24</sup> Harun Kadir, *op. cit.*, hal. 70.

sudah dikuasai Belanda. Pusat komando perang dari Palakka, lalu berpindah ke Passempe, Gottang, Lamuru kemudian ke arah utara Bone.<sup>25</sup> Masing-masing tempat ini dilalui oleh raja Bone yang telah dikejar oleh Belanda, berturut-turut Belanda menduduki daerah Ulaweng (3 Agustus), Tanjung (4 Agustus), Otu, Manapotu, Amali Utara dan Selatan, Palongki (5 Agustus), Laliku dan Kalu (6 Agustus).<sup>26</sup> La Pawawoi Karaeng Sigeri bersama rombongannya sempat istirahat di daerah Lamuru karena pengejaran Belanda sempat kehilangan jejak oleh lasykar Bone.

Selanjutnya perang frontal berubah menjadi perang gerilya di seluruh kerajaan yang berlangsung selama empat bulan sejak pengejaran dari Palakka. Setelah La Pawawoi Karaeng Sigeri bersama lasykaranya beristirahat selama tiga hari, datanglah undangan dari Soppeng. Beliau meminta Arung Pone bersama lasykaranya untuk bergabung dengan lasykar Soppeng sebagai wujud dalam perjanjian Tellumpocoe kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA).

Untuk menghindari pengejaran Belanda dan melanjutkan perang gerilya, La Pawawoi Karaeng Sigeri bersama lasykar melanjutkan perjalanan ke daerah Wajo, perjalanan

---

<sup>25</sup> Andi Muh. Ali, Loc. cit.

<sup>26</sup> Harun Kadir dkk., op. cit., hal. 71.

tersebut antara lain melalui daerah Wage, Tempe, Tuwa, Impakimpa, Pajalele, Ujung dan akhirnya raja Bone tiba di istana Cakkuridie di daerah Lowa Wajo.<sup>27</sup>

Di Lowa raja Bone mengadakan perjanjian permintaan bantuan dari Cakkuridie selaku wakil Arung matowa Wajo. Akan tetapi disitu sudah dianggap tidak aman maka raja Bone beserta pengikutnya berpindah ke Siwa lalu ke pegunungan Awo disebuah gua yang dinamakan Gua Batu.<sup>28</sup>

Di pegunungan inilah pertahanan terakhir dari raja Bone beserta lasyarnya untuk mengakhiri perang gerilya menang atau kalah. Pada tanggal 18 Nopember 1905 terjadilah perang akhir yang menyebabkan kematian Petta Ponggawae Baso Abdul Hamid di pangkuan istrinya datu Cinnong yang menyertainya.<sup>29</sup> Di sini pula La Pawawoi Karaeng Sigeri tertangkap oleh pasukan pendudukan Belanda dari Pare-pare, Makassar dan Bone. Dengan kematian Petta Ponggawae dan tertangkapnya raja Bone ke-31, maka dewan Ade Pitue terpaksa menerima dan menyetujui pernyataan singkat dari penjajah Belanda.

Sebagai akibat dari tertangkapnya La Pawawoi Karaeng Sigeri, beliau dibawa ke Pare-pare lalu ke Makassar ke-

---

<sup>27</sup>Andi Muh. Ali, op. cit., hal. 33.

<sup>28</sup>Ibid. hal. 34

<sup>29</sup>Ibid.

mudian diasingkan ke Jawa (Semarang dan Bandung).<sup>30</sup> pada tanggal 17 Januari 1911 La Pawawoi Karaeng Sigeri wafat dalam pengasingan sebagai tawanan di Bandung setelah menduduki takhta kerajaan Bone. Beliau meringkuk dalam penjara selama lima tahun lebih dan memegang takhta selama 10 tahun. Dia meninggalkan satu pernyataan<sup>31</sup> sebagai sebuah pendirian pejuang demi terlepas dan bebasnya kerajaan Bone dalam penjajahan Belanda pada akhir abad 19 dan awal abad 20.

#### D. Berakhirnya Kekuasaan La Pawawoi Karaeng Sigeri

Dalam abad ke-19 hubungan kerajaan Bone dengan dunia luar disimpulkan oleh Harun Kadir dkk bahwa ada dua jalur, yakni: 1. Kontak-kontak kenegaraan antara raja Bone dengan wakil-wakil kekuasaan Belanda dan Inggris di Makassar, yang sangat langka dan hanya merupakan pertemuan-pertemuan kilat; 2. Kontak-kontak pelaut Bone dengan suku-suku bangsa Indonesia lain, pedagang-pedagang Cina, India dan Arab dalam kunjungan-kunjungan mereka ke bandar-bandar kepulauan Indonesia, Singapura, Malaka dan Filipina untuk keperluan dagang. Hubungan itu hanyalah merupakan

---

<sup>30</sup>Ibid, hal. 6.

<sup>31</sup>Adapun isi pernyataannya adalah "Walaupun aku ditempatkan diluar petala langit asalkan saya tidak mengingkari kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SWA, sebab bagi saya hanya tubuhku yang menghadap tetapi hatiku tidak menghadap kepada Belanda."

pertemuan biasa dan tidak terlalu berkesan untuk sebuah perubahan. Kebanggaan orang Bone terhadap kebudayaannya menjadi sebab tertutupnya dari pengaruh luar, demikian pula dengan letak geografisnya.<sup>32</sup>

Di samping itu, sebagai akibat pertempuran yang terjadi di kerajaan Bone, yaitu perang antara kerajaan Bone dengan Belanda dari bulan Juli sampai Nopember 1905 kekalahan berada dipihak Bone. Dengan demikian pemerintahan di Bone dikuasai atau telah diprakarsai oleh kompeni Belanda. Belanda menduduki kerajaan Bone menurut kehendak kekuasaan kolonial. Dimana pada tahun-tahun pertama, pemerintahan di Bone dirangkap oleh perwira-perwira tentara Hindia Belanda.

Untuk merealisasikan pemerintahan pendudukan Belanda di Sulawesi selatan, maka residen Belanda Brugman dikawal oleh satu kompi tentara mengunjungi raja-raja Sulawesi selatan. Tujuan dari kunjungan itu adalah membujuk dan mengintimidasi raja Sul-sel untuk menandatangani perjanjian pendek. Perjanjian itu berhasil dirampungkan pada tahun 1906 sebagai akibat dari kekalahan kerajaan Bone dan Gowa. Adapun isi dari perjanjian pendek itu adalah: 1. Raja yang bersangkutan mengaku takluk di bawah, raja Belanda, dan kerajaannya adalah suatu bahagian dari Hindia Belanda, oleh karena itu harus setia kepada raja Belanda dan kepada wakilnya yakni Gubernur Jendral Hindia Belanda. 2. Tidak akan mengadakan hubungan ketata-

<sup>32</sup>Harun Kadir dkk, op.cit, hal.69-70

negara dengan kekuasaan-kekuasaan asing. Dan musuh Belanda adalah musuhnya sahabat Belanda adalah juga sahabatnya. 3. Akan mentaati segala peraturan mengenai negerinya yang ditetapkan oleh raja Belanda, maupun oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda atau oleh wakilnya. Dan selanjutnya akan menuruti segala perintah yang telah diberikan atau akan diberikan kepadanya oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda atau wakilnya.<sup>33</sup>

Dalam tahun 1905-1906 daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan dibentuk dalam lingkungan Gubernur Celebes bersama daerah taklukannya. Daerah taklukan itu berkedudukan di Makassar dan afdeling-afdeling serta onderafdeling-nderafdeling. Demikian juga dengan Bone, setelah perlawanan La Pawowoi Karaeng Sigeri berhasil dipatahkan maka pembagian daerah pemerintah secara tradisional diubah menjadi struktur pemerintahan kolonial Belanda. Adapun pembagian daerah Bone dapat diperlebar sebagai berikut : Afdeling Bone berpusat di Pompanua dan selanjutnya dipindahkan ke Watampone. Wilayah ini terdiri atas 5 onderafdeling seperti : a. Onderafdeling Bone tengah membawahi bagian bekas kerajaan Bone. b. Onderafdeling Bone Utara membawahi bahagian Utara bekas kerajaan Bone, c. Onderafdeling Bone Selatan membawahi bahagian Selatan bekas kerajaan Bone, d. Onderafdeling Wajo membawahi kerajaan Wajo, dan e. Onderafdeling Soppeng mem-

<sup>33</sup> Ibid., hal. 37

bawahi kerajaan Soppeng.<sup>34</sup> Demikian berakhirnya pemerintahan tradisional kerajaan Bone menjadi pendudukan kolonial Belanda. Sampai dengan tahun 1926, maka para bangsawan serta pemangku adat ( Hadat) aktiritasnya dalam pemerintahan sangat sedikit, karena telah uigantikan oleh kontrolir (Countraleur) dan stafnya.

---

<sup>34</sup> ibid, hal. 74

BAB V  
K E S I M P U L A N

Terangkatnya La Pawawoi Karaeng Sigeri sebagai raja Bone ke 31 mendapat dukungan dari Belanda di Makassar. Selain itu La Pawawoi-pun mendapatkan atau dianugrahi bintang kehormatan dari pemerintah Belanda. Namun, Dia ternyata bukan sebagai orang yang mudah dipengaruhi oleh pemerintah Belanda. La Pawawoi Karaeng Sigeri melalui persoalan ini telah membuktikan dirinya sebagai raja Bone yang tegas pada pendiriannya. Dia tegas dengan pendirian sebagai raja yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

La Pawawoi Karaeng Sigeri dalam memimpin rapat paripurna Kerajaan Bone untuk menentukan perang atau damai itu sangat tegas. Dalam sidang penting itu, dia dengan tegas dan lantang menolak ultimatum Belanda yang congkak dan selalu meremehkan Kerajaan Bone. Pidato pengarahannya mengandung semangat kepahlawanan dan perlawanan berjuang yang sangat menentang campur tangan urusan Kerajaan Bone. Walau sudah tua La Pawawoi Karaeng Sigeri bersama anaknya Baso Abdul Hamid memberi semangat kepada rakyat Bone untuk membela tanah airnya. Ikrar raja dan Ponggawa dalam rapat itu benar-benar membakar semangat untuk membuat kejengkelan rakyat pada pengaruh penetrasi Belanda.

Demikianlah telah terjadi perang Bone pada tahun 1905. Perang itu berlangsung selama lima bulan yakni bulan Juli sampai Nopember 1905. Mula-mula perang itu berlanjut secara frontal yakni dari satu tempat ke tempat yang lain dalam perkampungan Bajoe sampai ke Lalengbata Watampone. Belanda akhirnya merebut serta menduduki Ibu kota Kerajaan Bone. Kemudian perang itu berlanjut secara perang gerilya yakni dari daerah pedalaman atau hutan juga gunung-gunung kepada hutan-hutan lainnya sampai tertangkapnya raja La Pawawoi Karaeng Sigeri dan meninggalnya Baso Abdul Hamid, perang itu berangsur selesai, Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Pulau Jawa sampai wafat di sana, dia tetap berpendirian tidak mau bekerja sama dengan Belanda.

La Pawawoi Karaeng Sigeri menduduki takhta Kerajaan Bone ke 31 karena disamping dia telah berpengalaman dalam sistem politik dan pemerintahan di Kerajaan Bone juga mendapat bantuan dari kolonialisme Belanda. Pengalaman La Pawawoi Karaeng Sigeri tersebut dimulai dari beliau menjadi Dulung Ajangale, ketua Dewan Ade Pitue dan Ponggawae pada masa pemerintahan kakaknya Fatimah Banri. Sedangkan La Pawawoi Karaeng Sigeri mendapat dukungan atau dibantu oleh Belanda karena demi menyingkirkan I Magguliga Karaeng Popo bangsawan Gowa. Karena jika Karaeng Popo menjadi raja di Bone, maka ancaman terhadap Belanda semakin nyata bahwa Kerajaan Gowa dengan Kerajaan

Bone akan bersatu untuk melawan kolonial Belanda.

La Pawawoi Karaeng Sigeri berbalik menentang Belanda, karena politik monopoli dagang dan politik adu domba atau pemecah belah sudah diketahui oleh beliau. Beliau mengetahui hal itu sejak tanggal 16 Pebruari 1896 sewaktu menandatangani perjanjian persahabatan dan pada tanggal 31 Agustus 1896 menerima bintang kehormatan dari Belanda. Dari kerja sama itu, La Pawawoi Karaeng Sigeri dapat mengetahui politik ataupun strategi penaklukan Belanda.

Belanda menyerang Kerajaan Bone pada tahun 1905 karena raja Bone ke 31 yaitu La Pawawoi Karaeng Sigeri tidak mau kerja sama dengan Belanda. Dia menolak permintaan Belanda untuk menguasai pelabuhan niaga Kerajaan Bone yaitu Bajoe dan Pallime. Selain itu juga tidak mau menandatangani pernyataan pendek yang diajukan Belanda kepada Kerajaan Bone.

Demikianlah kesimpulan dari perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri raja Bone ke 31 dalam menentang ekspedisi Belanda pada awal abad ke 20 tepatnya pada tahun 1905.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Razak Dg. Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sul-Sel, 1989).
- Andi Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Watampone: Percetakan Damai, 1986).
- , "Rumpa'na Bone" Perang Bone 1905 (Watampone: Percetakan Damai, 1984).
- dan Andi Pabbara, Lontarak Kerajaan Bone, NO. 5. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Friedericy, H.J., Sang Jenderal (Jakarta: Grafiti, 1991)
- Gazalba, Sidi, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1981).
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).
- Hamid, Abu, "Catatan-Catatan Tentang Beberapa Aspek Kebudayaan Sul-Sel" Bingkisan Budaya Sul-Sel, (1978 Januari-Pebruari-Maret th 1-4).
- Hamzah, Aminah, dkk., Biografi Pahlawan La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone XXXI (Ujung Pandang: Dep. Dik. Bud, 1993).
- Hasniati, Bone: Dari Perang Hingga Zelfbestuur (Abad XIX-XX), (Ujung Pandang: Skripsi Pada Fakultas Sastra Unhas, 1992).
- Hassan, Shadily (Pimpred), Ensiklopedi Indonesia Jilid 3 (Jakarta: Ikhtiar Baru - Van Hoeve, 1980).
- Ibrahim, Muh. Yusuf, Pengertian Sejarah: Beberapa Pembahasan Mengenai Teori Dan Kaedah (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1986).
- Kadir, Harun, dkk., Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Bapeda Tingkat I Sul-Sel dan Lembaga Penelitian Unhas, 1984).
- , Sejarah Daerah Sulawesi Selatan (Jakarta: Dep. Dik. Bud, 1976).
- Kautaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar (Bandung: Sinar Baru, 1980).

Karim, Razak, Kerajaan Bone Sebelum Perang 1859. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sul-Sel.

Kartodirjo, Sartono, Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Gramedia, 1992).

-----, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme II (Jakarta: Gramedia, 1990).

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1985)

Kridalaksana, Harimurti, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia (Flores: Nusa Indah, 1989).

M.G., Moein Andi, Bunga Rampai Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra "Siri dan Pacce" (Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977).

Pattang, Lahadjji, Sulawesi Dan Pahlawan-Pahlawannya (Ujung Pandang: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia YKGMI, 1976).

Nugroho, E, Ensiklopedi Nasional Indonesia. (Jakarta: Cipta Adi Pustaka 1989).

Pawiloy, Sarita, Arus Revolusi '45 di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang Dewan Harian 45 Daerah Ang. 45 Propinsi Sul-Sel, 1987).

Pemda Bone, Lontarak Akkarungeng Bone (Bone: Pemda, 1985).

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

Abd. Razak Dg. Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulselra, 1964).